



IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN CIBITUNG

Devi Oktavia Tari, Gili Argenti, Rahman

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan yang meningkat karena Pandemi covid-19, menerapkan program-program Jaring Pengaman Sosial (JSP). Program regular dari JSP yaitu Program Sembako, mekanisme dari program ini yaitu penyaluran bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di E-warong. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Program Sembako pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Dalam pelaksanaannya program ini masih ditemukan beberapa permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, pungli, komoditas pangan tidak sesuai harga, dan keterlambatan penyaluran uang elektronik. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Kondisi Lingkungan mendukung adanya program, Hubungan Antar Organisasi terjalin dengan baik, Karakteristik dan Kemampuan agen pelaksana juga sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, akan tetapi sumber daya organisasi tidak sesuai dengan kebutuhan KPM dimana setiap desa atau kelurahan hanya ada 1 agen e-warong.

Kata Kunci: Implementasi, Pandemi Covid-19, Program Sembako.

PENDAHULUAN

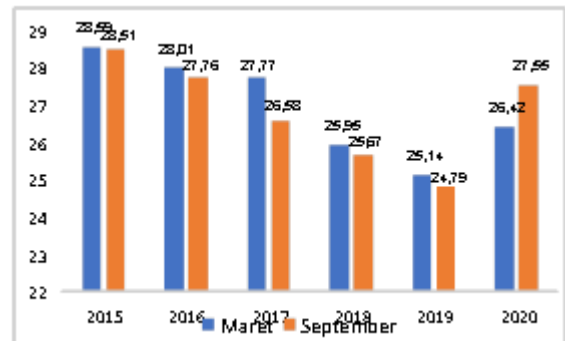
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang banyak dialami oleh berbagai negara. Tak terkecuali Indonesia. Kemiskinan di Indonesia menjadi suatu masalah yang kompleks yang harus dilakukan pembenahan secara menyeluruh. Banyak penyebab yang membuat angka kemiskinan di Indonesia sulit mengalami penurunan yang signifikan. Seperti pembangunan yang tidak merata, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan menyebabkan tingginya angka pengangguran, serta penyebab lainnya yang jarang dibahas namun berdampak besar terhadap perekonomian negara yaitu wabah penyakit. Wabah penyakit merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang sangat jarang dibahas karena jarang terjadi, namun bila terjadi maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara.

Periode akhir 2019, Dunia dihebohkan dengan terdeteksinya virus di China dan dapat dikatakan awal mula dunia mengalami Pandemi Covid-19. Virus Covid-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia per Maret 2020. Diperparah dengan persebaran virus yang masif. Segala sektor mengalami hambatan dan tantangan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan covid-19 sebagai pandemic. (Susilo et al., 2020). Kemudian pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan nama baru yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

Dengan meningkatnya kasus covid-19 membuat perekonomian Indonesia menurun hingga 5%, jika pandemic berlangsung lama tidak menutup kemungkinan jumlah penduduk miskin pun akan meningkat bila pemerintah tidak menanganinya dengan baik. (Yamali & Putri, 2020) Jumlah

penduduk miskin di Indonesia dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (dalam juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan grafik di atas, diketahui sejak tahun 2015 penurunan jumlah penduduk miskin secara konsisten terus menurun hingga tahun 2019, sebanyak 3,8 juta penduduk miskin Indonesia berkurang dalam kurun waktu 4 tahun. Kemudian di tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat drastis, dengan penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.76 juta. Ini membuktikan bahwa sejak pandemi covid-19 masuk ke Indonesia pada bulan maret 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dan menjadi penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia (Badan Pusat Statistik).

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang penanggulangnya memerlukan kebijakan dan program nasional berkelanjutan yang dilaksanakan secara terpadu. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu dalam hal pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Adanya pandemi covid-19 membuat

perekonomian berbagai negara terguncang termasuk Indonesia. Pemerintah dalam upaya meringankan beban masyarakat miskin serta masyarakat yang terdampak perekonomiannya karena covid-19, diwujudkan dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang merupakan program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat dari krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahap penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal.

Pemerintah dalam upaya meringankan beban masyarakat miskin serta masyarakat yang terdampak perekonomiannya karena covid-19, diwujudkan dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang merupakan program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat dari krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahap penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal. Pemberian jaring pengaman sosial dilakukan melalui dua program bantuan sosial yaitu program reguler dan program khusus. (Nasrah et al., 2021)

Pada masa pandemi program sembako dimasukkan kedalam kategori Program Jaring Pengaman Sosial dan disesuaikan dengan meningkatnya masyarakat miskin, sehingga program ini mengalami perluasan jumlah KPM. Indeks bantuan program Sembako yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Dimasa pandemi covid-19 jumlah dana program sembako ditambah sebesar 50 ribu menjadi 200 ribu, dan akan kembali ke jumlah dana awal yakni 150 ribu apabila keadaan perekonomian Indonesia membaik. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Untuk mendukung pelaksanaan bantuan non tunai Program Sembako, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan

Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan non tunai Program Sembako di Kecamatan Cibitung yang dikembangkan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan. Seperti pungli, komoditas pangan tidak sesuai harga, ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran uang elektronik. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan program sembako pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Cibitung. Mengingat bantuan non tunai Program sembako ini merupakan pengembangan dari program rastra yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan pelaksanaan program lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Namun kenyataannya permasalahan masih ditemukan, maka dari itu dibutuhkan suatu Implementasi yang jelas terkait pelaksanaan program sembako (bantuan pangan non tunai) bagi keluarga penerima manfaat pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Konsep Implementasi merupakan suatu kebijakan publik yang sangat bergantung pada susunan rumusan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2005) mengemukakan bahwa terdapat beberapa Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah. Variabel-variabel tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, yang dimaksud dari lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program tersebut.

2. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi suatu program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu koordinasi dan kerjasama antar instansi sangat diperlukan bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini karena peneliti memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan wawancara. Kemudian data-data yang diperoleh dan dihimpun dari informan dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah merupakan obyek yang berkembang apa adanya, artinya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran dari peneliti tidak boleh

mempengaruhi dinamika dari obyek tersebut. Peneliti memperoleh sumber data melalui 2 cara, yaitu secara langsung (data primer) dan diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Sedangkan dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara yang kemudian hasil dari data-data tersebut dianalisis melalui 3 aktivitas dalam analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Cibitung. Serta beberapa Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Cibitung dari desa atau kelurahan yang berbeda, yaitu Kelurahan Wanasari, Desa Wanajaya dan Desa Mekarmukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Cibitung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi yang telah melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yang meningkat akibat pandemi covid-19 yaitu jaring pengaman sosial dengan program regulernya program sembako yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan mengalami penambahan jumlah KPM dengan adanya program sembako perluasan dengan harapan dapat mengurangi masyarakat miskin dan membantu masyarakat yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi covid-19.

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai implementasi program sembako pada masa pandemi di Kecamatan Cibitung yang dianalisis menggunakan teori menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2005) mengemukakan bahwa terdapat beberapa Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan

program-program pemerintah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan

Dalam implementasi suatu program kondisi lingkungan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut. Impelementasi program sembako di Kecamatan Cibitung pada masa Pandemi Covid-19 terkait dengan kondisi lingkungan sosio kultural, tidak ada budaya masyarakat maupun tradisi khusus yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan pertentangan dengan kebijakan program sembako.

Menurut penuturan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cibitung, masyarakat cibitung cenderung sudah mengarah ke budaya modern, sejak berjalannya program ditahun 2018 tidak ada kasus masyarakat yang menganut adat ataupun budaya yang dapat menjadi pertentangan dalam pelaksanaan program. Mengenai keterlibatan penerima manfaat, diketahui sejak pandemi covid-19 jumlah Keluarga Penerima Manfaat program sembako mengalami perluasan atau penambahan. Jumlah KPM penerima program sembako di Kecamatan Cibitung dapat dilihat dibawah:

Tabel 1. Data Jumlah Penerima Bantuan Non Tunai Program Sembako di Kecamatan Cibitung Per-Kelurahan bulan Maret-April Tahun 2021

No	Kelurahan/ Desa	KPM		KPM Perluasan	
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2
1.	Cibuntu	224	224	243	243
2.	Kertamukti	651	651	231	231
3.	Muktiwari	492	492	215	215
4.	Sarimukti	335	335	172	172
5.	Sukajaya	527	527	182	182
6.	Wanajaya	393	393	328	328
7.	Wanasari	337	337	468	468
Jumlah		2959	2959	1839	1839

Sumber: Sistem Online Data Penerima Bansos, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 2021

Dengan jumlah ratusan KPM yang tentunya saat penyaluran bantuan akan menimbulkan kerumunan, dari keterlibatan penerima manfaat sendiri para KPM mengemukakan saran yang kemudian didengar oleh pendamping sosial seperti di desa Muktiwari Kecamatan Cibitung adalah dengan inisiatif membentuk kelompok dan mengatur jadwal pengambilan bantuan di agen e-warong agar tidak menimbulkan kerumunan. Sedangkan di Kelurahan Wanasari setiap Rukun Warga mengambil inisiatif untuk melakukan penyaluran bantuan secara kolektif di RW masing-masing, tentunya agar menghindari kerumunan di masa pandemi covid-19. Sedangkan permasalahan terletak pada lingkungan sosial masyarakat sekitar penerima bantuan, melalui keterangan dari TKSK serta PSM banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapat bantuan, yang bisa disebut sebagai kecemburuan sosial. Dimana masyarakat

merasa iri terhadap KPM yang mendapat bantuan program sembako.

2. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi dalam sebuah implemementasi program merupakan suatu faktor pendukung keberhasilan program. Koordinasi serta komunikasi yang baik antar instansi diperlukan agar tujuan dan arah sasaran kebijakan dari program dapat tercapai. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi selaku Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten berkoordinasi dengan tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan Cibitung dan berkomunikasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cibitung, agen e-warong serta pendamping sosial.

Dalam pelaksanaan program sembako di Kecamatan Cibitung pada masa pandemi covid-19, tentunya sosialisasi mengenai tata cara penyaluran bantuan di masa pandemi harus dilakukan agar sesuai dengan peraturan pemerintah agar tidak menyebabkan kerumunan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memberikan arahan kepada tim koordinasi tingkat kecamatan seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk memberikan penyuluhan mengenai tata cara penyaluran bantuan di masa pandemi kepada pendamping sosial, agen pelaksana seperti agen e-warong serta para Keluarga Penerima Manfaat di setiap desa maupun

kelurahan. Menurut penuturan agen e-warong, Dinas Sosial sesekali datang mengontrol saat penyaluran bantuan turun, sedangkan TKSK, pendamping sosial, Babinsa dan Bhimaspol selalu ada setiap penyaluran bantuan untuk memastikan tidak ada kerumunan. Ini menunjukkan hubungan serta komunikasi antar instansi maupun agen pelaksana baik dari tingkat desa atau pun kelurahan sampai tingkat pusat di Kecamatan Cibitung terjalin dengan baik.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Mengenai sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dalam hal ini baik sumberdaya manusia maupun (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources). Sumberdaya manusia dalam program sembako berdasarkan wawancara dengan ketua TKSK diketahui bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan program sembako telah memenuhi standar, aktor pelaksana program seperti pendamping sosial disetiap desa/kelurahan, bhimaspol, babinsa serta masyarakat sekitar yang ikut bergotong royong membantu dalam penyaluran bantuan. Lalu terkait sumberdaya non manusia seperti sumberdaya finansial yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk penyaluran bantuan kesetiap

rekening KPM sebesar 200 ribu telah disalurkan dan sesuai tidak ada kekurangan. Permasalahan datang dari sumberdaya fasilitas seperti ketersediaan agen e-warong yang terbatas, hanya ada 1 di setiap desa maupun kelurahan, karena di masa pandemi covid-19 yang seharusnya tidak boleh ada kerumunan sehingga jumlah agen e-warong yang hanya ada 1 di setiap desa dianggap kurang memadai.

Tabel 2. Daftar Agen E-warong di Kecamatan Cibitung

Desa/Kelurahan	Nama Agen E-warong
Wanasari	Agen Mardalih
Sarimukti	Agen Atikasari
Muktiwari	Agen Idi Rosmadi
Kertamukti	Agen Juhariah
Wanajaya	Agen Abdul Malik
Cibuntu	Agen Mimin Sri M
Sukajaya	Agen Kartika

Sumber: Tim Koordinator Bantuan Pangan Kecamatan Cibitung

Kemudian permasalahan lainnya terletak dari keluhan pemilik agen e-warong yang sering mendapati kendala pada mesin EDC yang mengalami gangguan sehingga proses transaksi pembayaran seringkali gagal.

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi program juga mempengaruhi keberhasilan dari program tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan para Keluarga

Penerima Manfaat serta observasi lapangan untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan dari para agen pelaksana di Kecamatan Cibitung seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial, Agen E-warong, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa para agen pelaksana memiliki sikap yang ramah, disiplin, serta dalam menyampaikan informasi maupun memberikan arahan mengenai sistem penyaluran bantuan di masa pandemi sangat jelas, hal ini didapati dari para KPM yang memberi jawaban saat di wawancarai oleh peneliti. Diketahui pula bahwa para agen pelaksana selalu mendengarkan keluhan serta masukan dari para KPM untuk memperbaiki program sembako ini. Dengan ini membuktikan karakteristik dari para agen pelaksana program sembako di Kecamatan Cibitung sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mana berbunyi bahwa pelayan publik harus berperilaku santun dan ramah kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian mengenai implementasi program sembako bagi keluarga penerima manfaat (kpm) pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam

Subarsono (2005) terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, Pertama, Kondisi Lingkungan, mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program bantuan pangan non tunai. Pada masa pandemi dimana adanya pembatasan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, pelaksanaan program sembako mengalami beberapa perubahan, seperti Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung, keluarga penerima manfaat (KPM) oleh pendamping sosial dibuatkan kelompok dan pengaturan jadwal pengambilan bantuan di agen e-warong. Sedangkan di Kelurahan Wanasari setiap Rukun Warga mengambil inisiatif untuk melakukan penyaluran bantuan secara kolektif di RW masing-masing. Kedua, Hubungan antar organisasi pada pelaksanaan program BPNT pada masa pandemi, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi memiliki hubungan sinergis dengan lembaga lain yang terlibat misalnya dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), agen e-warong serta para Keluarga Penerima Manfaat di setiap desa maupun kelurahan dan pada saat penyaluran Dinas Sosial datang melakukan pengawasan secara langsung. Ketiga, Sumber daya organisasi pada program BPNT di Kecamatan Cibitung telah memenuhi standar yang ditentukan, semua aktor pelaksana bergotong royong dalam melaksanakan program. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu mengenai sumber daya fasilitas, dimana hanya terdapat satu agen e-warong disetiap Desa yang dianggap kurang memadai dan mesin EDC yang sering mengalami gangguan. Empat, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana program BPNT di Kecamatan Cibitung seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pendamping Sosial, Agen E-warong, Rukun Warga dan Rukun Tetangga sangat responsif apabila ada masukan dari para keluarga penerima manfaat (KPM).

DAFTAR PUSTAKA

Nasrah, H., Irdiyanti, I., Nesner, Y., & Hidayati, F. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PEKANBARU. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(2).
<https://doi.org/10.24014/jel.v11i2.11699>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia. 2020. Pedoman Umum Program Sembako. Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1).
<https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2).
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>